

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Jimly Asshidiqie, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta: Sinar Grafik, 2010
- Bisnar M. Gultom, Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Soemitro Soejono & abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Zainuddin Ali, M.A., Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudmuji, Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Philippus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Sudikno Mertokusumo dan A Plato, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Cetakan ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers: Jakarta, 2010
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika: Jakarta, 2014

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terkait pengurusan Akta Kelahiran
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan
Internasional Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

- Ainul Yaqin, Hukum Progresif Mahkamah Konstitusi, telaah terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pencabutan Pasal 32 UU
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk, dari
<http://reformasihukum.org/ID/file/politik-pemilu/>
- Sahri Ningsih, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-
XI/2013 terhadap Pelaksanaan Kewenangan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dalam Pengurusan Akta Kelahiran, Makassar:
Skripsi Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin, 2014
- Margaretha Eveline, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan
dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Dihubungkan dengan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
di Kota Bekasi, Semarang: Tesis Program Studi Magister
Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009
- Devi Novita Sari, Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XI/2013 terhadap Pelayanan Akta Kelahiran Terlambat Melampaui
Batas 60 (Enam Puluh) Hari Sampai Dengan 1 (Satu) Tahun Studi di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Malang:
Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya, 2014

D. Website

Ilhamendra,2011. Penafsiran Konstitusi Dan Pemahaman singkat aliran orginalism. Diakses

dari:<http://ilhamendra.wordpress.com/2011/01/30/penafsiran-konstitusipemahaman-singkat-aliran-orginalism/>. [16 Desember 2013]

Rzha39,2013. Judicial interpretation penafsiran hakim.Diakses dari : <http://ryzha39.blogspot.com/2013/06/judicial-interpretation-penafsiran-hakim.html>. [16 Desember 2013]

Hukumsda, 2012. Macam-macam cara penafsiran interpretasi,. Di Akses Dari <http://hukumsda.blogspot.com/2012/09/macam-macam-cara-penafsiran-interpretasi.html> [15 Desember 2013]

<http://m.antaranews.com/berita/375108/warga-berbondong-urus-aktakelahiranpascaputusan-mk>

Alimuddin, Akta Kelahiran sebagai Perlindungan Hukum terhadap hak anak,diaksesdarihttp://www.papalembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=918:aktakelahiransebagai-perlindungan-hukum-terhadap-hak-anak--oleh-alimuddin-shimh106&catid=135:artikel&Itemid=182

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/index.php/pencatatan-sipil/93artikel/122akta-kelahiran-hak-masyarakat-atas-identitas>

<http://www.legiantengah.com/index.php/pentingnya-akte-kelahiran-anak/>

